



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN BALANGAN DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Pemerintah 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Bupati/Walikota tentang Kebijakan dan Strategi Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati/Walikota tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Balangan tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Balangan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembara Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

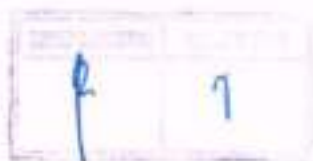
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN BALANGAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
5. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.



6. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Kabupaten yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II ARAH JAKSTRADA KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Jakstrada Kabupaten memuat :
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan Kabupaten dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

f g

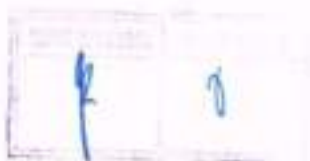
- b. daur ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga

Strategi, Target, dan Program Kabupaten dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 4

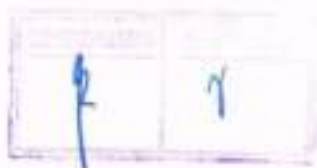
- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat/Kementerian;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :



- a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- b. penguatan koordinasi dan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat/Kementerian;
- c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di provinsi dan kabupaten/kota dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- e. pembentukan sistem informasi;
- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
- h. penguatan penegakan hukum;
- i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah ;
- j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III
PENYELENGGARAAN JAKSTRADA**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 7

- (1) Jakstrada Kabupaten sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang provinsi dan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Balangan.
- (2) Penyusunan Jakstrada kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selain berpedoman kepada Jakstranas dan juga berpedoman kepada Jakstrada Provinsi.

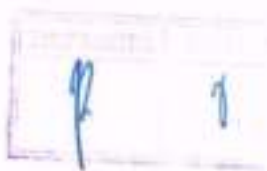
**Bagian Kedua
Jakstrada Kabupaten/Kota**

Pasal 8

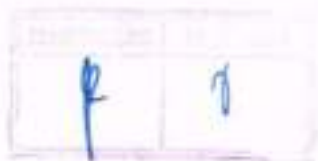
- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Bupati bertugas:
 - a. melaksanakan dan mengkoordinasikan Jakstrada kabupaten ;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada kabupaten ;
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kabupaten kepada gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di daerah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Daerah.
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator :
 - a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;



- b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator :
- a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada kabupaten.
- (5) Terhadap laporan Jakstrada kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan evaluasi oleh bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan oleh bupati melalui:
- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (7) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada kabupaten.



BAB IV
PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada kabupaten dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 17 September 2018
BUPATI BALANGAN,

Ttd

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 17 September 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

Salinan/Fotocopy sesuai dengan aslinya

Ttd

H. RUSKARIADI

Mengetahui,

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**



**H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009**

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 37 TAHUN 2018
 TENTANG
 KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN BALANGAN DALAM
 PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
 SAMPAH RUMAH TANGGA

PROGRAM KEBIJAKANDAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
 KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2017 - 2025

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Balangan

| INDIKATOR | TAHUN | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (Ton/Tahun) | 18.847,578 | 19.120,868 | 19.398,120 | 19.679,393 | 19.964,744 | 20.254,233 | 20.547,920 | 20.845,864 |
| Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada | 18% | 20% | 22% | 24% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Balangan (Ton/Tahun) | 3.392,564 | 3.824,174 | 4.267,587 | 4.723,054 | 5.190,834 | 5.468,643 | 5.753,417 | 6.253,759 |

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Balangan

| INDIKATOR | TAHUN | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (Ton/Tahun) | 18.847,578 | 19.120,868 | 19.398,120 | 19.679,393 | 19.964,744 | 20.254,233 | 20.547,920 | 20.845,864 | | |
| Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada | 73% | 80% | 75% | 74% | 73% | 72% | 71% | 70% | | |
| Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Balangan (Ton/Tahun) | 13.758,732 | 15.296,694 | 14.548,590 | 14.562,751 | 14.574,263 | 14.583,048 | 14.589,023 | 14.592,105 | | |

Salinan/Fotocopy sesuai dengan aslinya

Mengetahui,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN



H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 37 TAHUN 2018
 TENTANG
 KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN BALANGAN DALAM
 PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA dan SAMPAH SEJENIS
 SAMPAH RUMAH TANGGA

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
 KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2017 - 2025

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG | | |
|-----|---|--|--|---------------|-------|------|------|------|------|------|------|--------------|------------------|--|--|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | 2025 | |
| | Peningkatan kinerja dan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga | a. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga | 1) Penyusunan dan kaji ulang standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang tepat guna (<i>best practicable technology</i>) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 2) Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga b) Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen/tahun | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bappeda, Balitbangda, Dinas Lingkungan Hidup | DPUPR, Dinas KUKP, DisPerindag, DisPerkim, Dinas PMD dan Pemprov |
| | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bappeda, Balitbangda, Dinas Lingkungan Hidup | DPUPR, Dinas KUKP, DisPerindag, DisPerkim, Dinas PMD dan Pemprov |
| | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bappeda, Balitbangda, Dinas Lingkungan Hidup | DPUPR, Dinas KUKP, DisPerindag, DisPerkim, Dinas PMD dan Pemprov |
| | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bappeda, Balitbangda, Dinas Lingkungan Hidup | DPUPR, Dinas KUKP, DisPerindag, DisPerkim, Dinas PMD dan Pemprov |

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG | | |
|-----|-----------|----------|--|-------------------|-------|------|------|------|------|------|--------------|------------------|--|---|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | 2024 | 2025 |
| | | | 3) Penyusunan dan kaji ulang standar prosedur operasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen/ tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Bappeda, Balitbangda, Dinas Lingkungan Hidup | DPUPR, Dinas KUKP, DisPerindag, DisPerkim, Dinas PMD dan Pemprov |
| | | | b) Pendaوران ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen/ tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Bappeda, Balitbangda, Dinas Lingkungan Hidup | DPUPR, Dinas KUKP, DisPerindag, DisPerkim, Dinas PMD dan Pemprov |
| | | | c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen/ tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Bappeda, Balitbangda, Dinas Lingkungan Hidup | DPUPR, Dinas KUKP, DisPerindag, DisPerkim, Dinas PMD dan Pemprov |
| | | | 4) Penetapan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: | | | | | | | | | | | |
| | | | a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen/ tahun | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bappeda, Balitbangda, Dinas Lingkungan Hidup | DPUPR, Dinas KUKP, DisPerindag, DisPerkim, Dinas PMD, SATPOL PP dan Pemprov |
| | | | b) Pendaوران ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen/ tahun | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bappeda, Balitbangda, Dinas Lingkungan Hidup | DPUPR, Dinas KUKP, DisPerindag, DisPerkim, Dinas PMD, SATPOL PP dan Pemprov |
| | | | c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen/ tahun | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bappeda, Balitbangda, Dinas Lingkungan Hidup | DPUPR, Dinas KUKP, DisPerindag, DisPerkim, Dinas PMD, SATPOL PP dan Pemprov |

| NO. KEBLIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG |
|----------------|---|--|-------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|--------------|---|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| | b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah | 1) Penyusunan keputusan bersama, peraturan bersama, atau kerja sama dalam: a) Pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga b) Anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah | Dokumen/ tahun | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Dinas Pendidikan DPUPR, Dinas KUKP, DisPerindag, DisPerkim, dan Dinas PMD |
| | c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah di pusat dan daerah dan pelaksanaan forum komunikasi di tingkat pusat dan daerah | Dokumen/ tahun | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan keuangan daerah |
| | d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 1) Advokasi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga kepada: a) Pemerintah Kabupaten 2) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kegiatan pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah | Kecamatan, Kelurahan dan Desa | 20 | 40 | 80 | 100 | 120 | 160 | 165 | 165 | Dinas Lingkungan Hidup DPUPR, DisPerkim, dan Dinas PMD dan Pemprov |

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG | |
|-----|-----------|---|---|-------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|--------------|------------------|---|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | 2025 |
| | | | Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di: | | | | | | | | | | | |
| | | | a) Pemerintah Kabupaten | Kecamatan, Kelurahan dan Desa | 20 | 40 | 80 | 100 | 120 | 160 | 165 | 165 | | DUPR, Dinas KUKP, DisPerindag, DisPerkim, Dinas PMD dan Pemprov |
| | | | 3) Pembentukan bank sampah induk di kabupaten/kota | Kabupaten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Pemkab |
| | | e. Pembentukan sistem informasi | Pengembangan jejaring nasional data operasional bank sampah dan TPS3R yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH) di: | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) Pemerintah Kabupaten | Kabupaten | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | DPUPR, Dinas KUKP, DisPerindag, DisPerkim, Dinas PMD, DisKominfo dan Pemprov |
| | | f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) | 1) Peningkatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui KIE secara formal dan informal | Kecamatan, Kelurahan dan Desa | 20 | 40 | 80 | 100 | 120 | 160 | 165 | 165 | | Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, DisKominfo, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas PMD dan Pemprov |
| | | | 2) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat | Kabupaten | | | | | | | | | | Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, DisKominfo, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas PMD, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Pemprov |
| | | | - Sosialisasi / bimtek ke Kecamatan | Kali/Tahun | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | |
| | | | - Bimtek Peningkatan Kapasitas Bank Sampah dan TPS 3R | Kali/Tahun | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| | | | - Bantuan Mesin Pencacah | Unit | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG | |
|-----|-----------|---|--|--------------------|-------|------|------|------|------|------|------|--------------|-------------------------|--|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | 2025 |
| | | | - Bantuan Mesin Kompos | Unit | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| | | | 3) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis kawasan | Kelurahan dan Desa | 16 | 32 | 40 | 48 | 54 | 64 | 64 | 64 | Pemkab Balangan | Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas KUKP, DisPerindag, Dinas Pendidikan, DisKominfo, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas PMD dan Pemprov |
| | | | 4) Edukasi antara lain melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran, dan taman edukasi | Kecamatan | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Pemkab Balangan | Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas KUKP, DisPerindag, Dinas Pendidikan, DisKominfo, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas PMD dan Pemprov |
| | | | 5) Peningkatan Kemitraan Masyarakat dan Swasta | Kecamatan | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas KUKP, DisPerindag, Dinas Pendidikan, DisKominfo, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas PMD dan Pemprov |
| | | | 1) Integrasi bank sampah menjadi UKM lingkungan hidup untuk mendapatkan KUR 2) Penerapan sistem insentif untuk produsen yang melaksanakan kewajiban dalam | Unit/tahun | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Dinas LH dan Dinas KUKP | BPR Paringin, Pemprov dan Dunia Usaha |
| | | g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif | | Produsen/tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas KUKP, DisPerindag, Badan Keuangan Daerah, |

| NO. KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG | | |
|---------------|---|---|------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|--------------|------------------|--|---|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | 2025 | |
| | dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis | pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis | | | | | | | | | | | dan pemprov | |
| | Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis | 3) Penerapan sistem disinsentif untuk produsen yang tidak melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Produsen/tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas KUKP, DisPerindag, Badan Keuangan Daerah, dan pemprov |
| | Sampah Rumah Tangga | 4) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Kelompok orang/ Bank sampah/ tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas KUKP | Dinas KUKP, DisPerindag, Badan Keuangan Daerah, dan pemprov |
| | Sampah Rumah Tangga | 5) Penerapan sistem disinsentif bagi kabupaten/kota yang tidak melakukan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat | Kabupaten/tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas KUKP | Dinas KUKP, DisPerindag, Badan Keuangan Daerah, dan pemprov |
| | Sampah Rumah Tangga | 6) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (<i>beyond compliance</i>) | Kawasan/tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas KUKP, DisPerindag, Badan Keuangan Daerah, dan pemprov |
| | h. Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam | Pengembangan dan Penerapan Kebijakan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah, meliputi: Pengembalian/penukaran bekas kemasan/produk tertentu pada retail/pertokoan | Produsen/tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perdagangan | Pemprov, Ritel dan Pertokoan |

| NO. KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG | | |
|---------------|---|--|---------|-------|------|------|------|------|------|--------------|------------------|---|---|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | 2024 | 2025 |
| 2. | <p>pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</p> <p>a. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</p> | <p>1) Penyusunan Perda/Perbup mengenai pendanaan dan kompensasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (<i>tipping fee</i>)</p> <p>2) Penyusunan kajian dan standar retribusi jasa pelayanan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir</p> <p>3) Penyusunan dan kaji ulang standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang terbaik (<i>best available technology</i>) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi: pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir</p> <p>4) Penyusunan prosedur penanganan dan pengujian Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terkontaminasi limbah B3 dalam rangka penegakan hukum</p> <p>5) Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:</p> | Dokumen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Bappeda, Balitbangda, Dinas Lingkungan Hidup | DPUPR, Dinas KUKP, DisPerindag, DisPerkim, Dinas PMD dan Pemprov |
| | | | Dokumen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Bappeda, Balitbangda, Dinas Lingkungan Hidup | DPUPR, Dinas KUKP, DisPerindag, DisPerkim, Dinas PMD, Badan Keuangan Daerah dan Pemprov |
| | | | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | DPUPR, Bappeda, Balitbangda, Dinas Lingkungan Hidup | Dinas KUKP, DisPerindag, DisPerkim, Dinas PMD, Badan Keuangan Daerah dan Pemprov |
| | | | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Dinas Lingkungan Hidup | Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan, Polres, dan Kejaksaan |

| NO. | KEBLAJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG | |
|-----|------------|----------|---|---------|-------|------|------|------|------|------|------|--------------|-------------------------|--|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | 2025 |
| | | | a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas LH dan Dinas PUPR | Bappeda, Balitbangda dan Pemprov |
| | | | b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas LH dan Dinas PUPR | Bappeda, Balitbangda dan Pemprov |
| | | | c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas LH dan Dinas PUPR | Bappeda, Dishub, Balitbangda dan Pemprov |
| | | | d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas LH dan Dinas PUPR | Bappeda, Balitbangda dan Pemprov |
| | | | e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas LH dan Dinas PUPR | Bappeda, Balitbangda dan Pemprov |
| | | | f) Penyusunan dan kaji ulang prosedur operasional standar penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: | | | | | | | | | | | |
| | | | a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas LH dan Dinas PUPR | Bappeda, Balitbangda dan Pemprov |
| | | | b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas LH dan Dinas PUPR | Bappeda, Balitbangda dan Pemprov |
| | | | c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas LH dan Dinas PUPR | Bappeda, Dishub, Balitbangda dan Pemprov |
| | | | d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas LH dan Dinas PUPR | Bappeda, Balitbangda dan Pemprov |
| | | | e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas LH dan Dinas PUPR | Bappeda, Balitbangda dan Pemprov |
| | | | f) Penyusunan dan kaji ulang standar kompetensi pelaksanaan kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: | | | | | | | | | | | |
| | | | a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas | Dinas PUPR, |

| NO. KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG | |
|---------------|----------|--|---------|-------|------|------|------|------|------|--------------|------------------|--|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | 2024 |
| | | Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | | | | | | | | | Lingkungan Hidup | Bappeda, Balitbangda dan Pemprov |
| | | b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas PUPR, Bappeda, Balitbangda dan Pemprov |
| | | c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas LH, Dinas PUPR, Bappeda, Balitbangda dan Pemprov |
| | | d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bappeda, Balitbangda dan Pemprov |
| | | e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bappeda, Balitbangda dan Pemprov |
| | | 9) Menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: | | | | | | | | | | |
| | | a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Dinas PUPR, Bappeda, Balitbangda dan Pemprov |
| | | b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Dinas PUPR, Bappeda, Balitbangda dan Pemprov |
| | | c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Dinas PUPR, Dishub, Bappeda, Balitbangda dan Pemprov |
| | | d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Dinas PUPR, Dishub, Bappeda, Balitbangda dan Pemprov |
| | | e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Dinas PUPR, Dishub, Bappeda, Balitbangda dan Pemprov |

| NO. KEBLJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG | |
|---------------|---|---|--|-------|------|------|------|------|------|------|--------------|---|--|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | 2025 |
| | | 10) Penyusunan pedoman <i>refuse defined fuel</i> (RFD) | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Dinas LH | Pemprov Dinas PUPR, Dishub, Bappeda, Balitbangda, Dinas KUKP dan Dinas Perdagangan |
| | b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah | 1) Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam: a) Penyediaan lahan | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Dinas Perkim | Bagian Pemerintahan, Badan Keuangan Daerah, Dinas PUPR dan Dinas LH |
| | | b) Pembinaan pemulung | Dokumen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Keuangan Daerah, Dinas KUKP, Dinas PUPR, dan pemprov |
| | | c) Anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir | Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | Pemkab Balangan | Badan Keuangan Daerah, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perkim |
| | | d) Teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir | Dokumen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Bappeda dan Balitbangda | Dinas Pendidikan |

f
1

| NO. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG | |
|-----|-----------|--|---|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|--------------|---------------------------------------|---|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | 2025 |
| | | | 2) Pembangunan dan revitalisasi TPA kabupaten/ kota | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pemkab Balangan | Dinas PUPR |
| | | c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di pusat dan daerah serta pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tingkat pusat dan daerah | Pertemuan/tahun | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR | DPRD Kabupaten Balangan dan pemprov |
| | | d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 1) Advokasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir kepada: b Pemerintah Kabupaten c) DPRD kabupaten | Daerah | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR | Dinas KUKP, Dinas Perdagangan, Dis Perkim dan pemprov |
| | | | 2) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir di: | Daerah | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR | Dinas KUKP, Dinas Perdagangan, Dis Perkim dan pemprov |

9

| NO. KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG | |
|---------------|--|--|-----------|-------|------|------|------|------|------|------|--------------|---|---|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | 2025 |
| | | a) Pemerintah Kabupaten | Daerah | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Dinas Lingkungan Hidup dan POKJA Sanitasi | Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, DisKominfo, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas PMD, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Pemprov |
| | e. Pembentukan sistem informasi | Pengembangan jejaring nasional data dasar sistem pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan operasionalisasi TPA yang diintegrasikan dengan SILH di: | | | | | | | | | | | |
| | | 1) Pemerintah Kabupaten | Daerah | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Lingkungan Hidup | Badan Keuangan Daerah, Dinas KUKP, Dinas Perdagangan, Dinas PUPR, Dinas Kominfo, pemprov |
| | f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui KIE | 1) Peningkatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir 2) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di masyarakat | Kabupaten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas PUPR, Dinas KUKP, Dinas Perdagangan dan pemprov |
| | | | Kecamatan | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Pemkab Balangan | Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Kominfo, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Dinas Perkim |

f
7

| NO. KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG | | |
|---------------|--|---|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|---|---|---|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | 2025 | |
| | | 3) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di kawasan | Kecamatan | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Pembab Balangan | Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas KomInfo, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Dinas Perkim |
| | | 4) Pengembangan model pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui: a) Pembentukan unit bank sampah di masyarakat | Unit | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas KUKP, Dinas Perkim Pemprov, dan pelaku usaha | |
| | | b) Kawasan (TPS 3R) - Pemerintah - Masyarakat | Kabupaten Unit Unit | 5 0 | 6 0 | 6 1 | 6 1 | 6 2 | 7 2 | 6 3 | 6 4 | Dinas PUPR, Dinas Lingkungan hidup | Kementerian PUPR dan Kementerian LHK | |
| | | 5) Peningkatan kemauan membayar (<i>willingness to pay</i>) masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Rp/M3 | 10rb | 10rb | 10rb | 10rb | 15rb | 15rb | 15rb | 15rb | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas PUPR, | |
| | g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan | 2) Peningkatan peran dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Pelaku Usaha | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | Dinas Lingkungan Hidup | Badan Keuangan Daerah, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas PUPR dan Pelaku Usaha | |
| | h. Penguatan penegakan hukum | 1) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, | Orang | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas Perhubungan, Polres, Satpol PP dan Kejaksaan | |

| NO. KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG | | | |
|---------------|---|--|------------------|-------|------|------|------|------|------|--------------|------------------|---|--|--|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | 2024 | 2025 | |
| | | Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, jaksa, polisi, pegawai pada Dinas Perhubungan di wilayah Kota, mulai dari pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir | | | | | | | | | | | | |
| | | 2) Pengawasan terhadap ketepatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir | Kecamatan | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Dinas Lingkungan Hidup | Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan, Polres, Satpol PP dan Kejaksaan | |
| | 1. Penguatan keterlibatan dunia usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kemitraan dengan Pemerintah Daerah | Pengintegrasian pengurusan izin penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ke dalam lembaga perizinan terpadu satu pintu yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah | Kabuapten/ Tahun | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DPMPSP | Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan | |
| | 1) Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir | 1) Pelaksanaan diseminasi informasi teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir | Kecamatan | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, dan Bappeda | Dinas Komunikasi dan Informatika, Balitbangda, dan Pemprov | |

1

f

| NO. KEBLJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG | | |
|---------------|----------|---|-------------|-------|------|------|------|------|------|------|--------------|------------------|---|--|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | 2025 | |
| | | 2) Penelitian dan pengembangan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir | Dokumen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Balitbangda dan Bappeda | Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pendidikan dan Pemprov |
| | | a) Penangkapan dan pemanfaatan gas metana menjadi sumber energi listrik di TPA | Kabupaten | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas PUPR | Bappeda, Balitbangda, dan Pemprov |
| | | b) Pemanfaatan sampah menjadi bahan bakar | Kabupaten | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas PUPR | Bappeda, Balitbangda, dan Pemprov |
| | | 4) Penerapan teknologi pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang ramah lingkungan menjadi energi terbarukan | Kabupaten | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas PUPR | Badan Keuangan Daerah, Bappeda, Balitbangda, dan Pemprov |
| | | 1) Pembentukan mekanisme dan sistem insentif dan disinsentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas KUKP, Dinas Perdagangan, dan pemprov, |
| | | 2) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat - Lomba kebersihan lingkungan | Kali/ Tahun | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kominfo | Dinas KUKP, Dinas Perdagangan, Dinas PUPR, Dinas Kominfo, Dinas Perkim dan Media Massa |
| | | 3) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi Kecamatan / Kelurahan/ Desa/ Kantor yang tidak melakukan penanganan Sampah Rumah Tangga dan | | | | | | | | | | | Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kominfo | Pemkab/kota OPD terkait dan Media Massa |